

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT NUSANTARA BERKAH SENTOSA**

LUBUK PAKAM

Oleh:

FITRI MUSTIKA

NIM. 51.14.3.040

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M / 1439 H**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT NUSANTARA BERKAH SENTOSA**

LUBUK PAKAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
1 (S1) Akuntansi Syariah pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

FITRI MUSTIKA

NIM. 51.14.3.040

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M / 1439 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Bejudul :

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT NUSANTARA BERKAH SENTOSA
LUBUK PAKAM**


Oleh:

**FITRI MUSTIKA
NIM. 51143040**

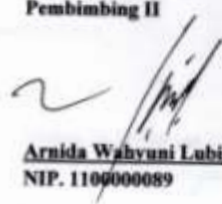
Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 24 September 2018

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP.197604232003121002

Pembimbing II


Arnida Wahyuni Lubis, M.Pd
NIP. 1100000089

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah


Hendra Harmain, M. Pd
NIP.197305101998031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FITRI MUSTIKA**
NIM : 51143040
Tempat dan Tanggal Lahir : Patumbak, 01 Juni 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pertahanan Dusun V/Gang Sadar
Patumbak Kampung

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NUSANTARA BERKAH SENTOSA, LUBUK PAKAM.**"

benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 Desember 2018

Yang Membuat Pernyataan


FITRI MUSTIKA

Skripsi berjudul "ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NUSANTARA BERKAH SENTOSA, LUBUK PAKAM" an Fitri Mustika, NIM. 51143040 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 12 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 12 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,


Hendra Harnain, SE, M.Pd.
NIP. 19730510 199803 1 003

Sekretaris,

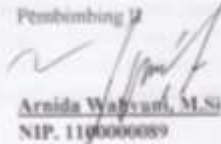

Muhammad Saiful, MA
NIP. 110000009

Anggota

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yafiz, MA
NIP. 19760421 200312 1 002

Pembimbing II


Arnida Wahyuni, M.Si
NIP. 1100000089

Penguji


Dr. Suzianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003

Penguji II


Arwa Nasser Daulay, M.Si
NIP. 1100000091

Mengetahui,


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumatera Utara Medan
Dr. Saiful, MA
NIP. 1100000091

ABSTRAK

FITRI MUSTIKA. NIM. 51.14.3.040. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BMT NUSANTARA BERKAH SENTOSA, LUBUK PAKAM.

Pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk penyediaan dan pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Karena tingginya minat Pembiayaan *murabahah* di BMT Nusantara Berkah Sentosa maka harus dilakukan pengendalian internal yang baik untuk menjaga kekayaan perusahaan dari hal-hal yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengendalian internal berbasis COSO terhadap pembiayaan *murabahah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dan didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan pada BMT Nusantara Berkah Sentosa. Hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian internal terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT Nusantara Berkah Sentosa belum berjalan dengan baik. Kurangnya pengawasan dalam hal pemberian pembiayaan *murabahah* menjadi faktor terjadinya kredit macet.

Kata Kunci: COSO, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan *Murabahah*, Pengendalian Internal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim

Alhamdulillah, Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NUSANTARA BERKAH SENTOSA, LUBUK PAKAM**”. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmatan Li’alamin. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peneliti menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda tersayang Abdullah dan ibunda tercinta Rahmi Lubis yang tak pernah letih memberikan dukungan, bantuan moril dan material, nasihat dan do’a hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku dosen pembimbing skripsi I, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.

4. Ibu Arnida Wahyuni Lubis, M. Pd, selaku dosen pembimbing skripsi II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
5. Bapak Hendra Hermain, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Tuti Anggraini, MA selaku dosen pembimbing akademik, yang berkontribusi banyak dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis selama perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Bapak Syafruddin Hanafi Siregar selaku kepala BMT Nusantara Berkah Sentosa yang telah memberika izin penelitian dan segenap karyawan BMT Nusantara Berkah Sentosa, Lubuk Pakam yang telah memberikan motivasi kepada penulis
9. Kakak tercinta Nur Hayati, Nurleli, A.md, Nurjannah, ST dan abangda tercinta Muhammad Rivai dan Muhammad Julham yang telah memberikan dukungan dan semangat
10. Sahabat Menuju Surga: Dewi Suryani Harahap, Anggi Meidia Dita, Fitri Hartati
11. Teman-teman stambuk 2014 AKS-C, terkhusus sahabat-sahabat Amalia Lika, Enda Hari Utari, Idha Minaty Rambe, Dina Maghfirah, Iin Sriyani Tanjung dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.
12. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya. Terimakasih, wassalam.

Medan, 23 September 2018

FITRI MUSTIKA
NIM. 51.14.3.040

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Batasan Istilah.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Sistem Pengendalian Internal.....	6
1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal	6
2. Tujuan Pengendalian Internal	7
3. Unsur Pengendalian Internal	7
4. Keterbatasan Pengendalian Internal	10
5. Pinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal	12
6. Elemen-elemen Pengendalian Internal	13
7. Karakteristik Pengendalian yang efektif.....	13
8. Pengendalian Intern dalam Islam	14
B. Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	16
1. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	16
2. Ciri-ciri Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	18
3. Tujuan Baitul Mal wat Tamwil (BMT)	18
C. Pembiayaan.....	18

1. Unsur Pembiayaan.....	19
2. Tujuan Pembiayaan	21
3. Fungsi Pembiayaan.....	22
4. Pembiayaan Bermasalah.....	23
D. <i>Murabahah</i>	25
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	25
2. Landasan Syariah	26
3. Syarat <i>Murabahah</i>	26
4. Jenis <i>Murabahah</i>	27
5. Manfaat dan Resiko <i>Murabahah</i>	27
E. Penelitian Sebelumnya	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian	38
1. Sejarah Singkat BMT Nusantara Berkah Sentosa	38
2. Visi dan Misi	38
3. Tujuan Berdirinya BMT Nusantara Berkah Sentosa.....	39
4. Prinsip Operasional BMT Nusantara Berkah Sentosa.....	39
5. Produk-produk BMT Nusantara Berkah Sentosa.....	39
6. Wilayah Pemasaran	41
7. Struktur Organisasi	41
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT Nusantara Berkah Sentosa.....	42

1. Pengajuan Pembiayaan	42
2. Pemeriksaan dan Analisis Kredit.....	45
3. Persetujuan Pemberian Pembiayaan	47
4. Realisasi Pembiayaan.....	48
C. Pembahasan	50
1. Unsur-unsur sistem pengendalian internal berbasis COSO pada BMT Nusantara Berkah Sentosa	50
a. Lingkungan Pengendalian	50
b. Penilaian Resiko	52
c. Informasi dan Komunikasi	52
d. Pengawasan	52
e. Aktivitas Pengendalian.....	53
2. Analisis Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> berbasis COSO	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang bermasalah	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	30
Tabel 4.1 Wilayah Pemasaran BMT Nusantara Berkah Sentosa	41
Tabel 4.2 Angsuran Pembiayaan Modal Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Nusantara Berkah Sentosa	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Nusantara Berkah Sentosa	41
Gambar 4.2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	44
Gambar 4.3 Analisa Pembiayaan	46
Gambar 4.4 Persetujuan Permohonan Pembiayaan	47
Gambar 4.5 Realisasi Pembiayaan	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dapat dikatakan menjadi bagian dari dinamika yang terjadi pada industri keuangan syariah global. Secara umum industri keuangan syariah Indonesia yang dimotori oleh sektor perbankan, baru berkembang pada akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an. Berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, menjadi tonggak perkembangan aplikasi ekonomi dan keuangan syariah secara luas khususnya dalam sistem keuangan nasional. Selain perbankan, sistem keuangan syariah di Indonesia juga meliputi pasar modal, reksadana, asuransi, koperasi, BMT, dan lembaga keuangan mikro lainnya.¹

BMT Nusantara Berkah Sentosa merupakan suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berlokasi di Jl. Bakaran Batu Komplek Pasar Bakaran Batu No. 40 D Lubuk Pakam, yang pada saat ini memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan, sehingga ini sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. BMT Nusantara Berkah Sentosa mempunyai potensi cukup tinggi dalam hal pembiayaan. Terlebih lagi untuk pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat karena mudahnya penanganan administrasi. Selain memiliki potensi yang cukup tinggi pembiayaan *murabahah* juga rentan atas permasalahan pembiayaan atau kredit macet.

Pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Pengendalian intern yang baik

¹Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.16 .

diterapkan dalam suatu perusahaan akan menciptakan prosedur kerja yang sistematis dan sesuai dengan aturan-aturan yang lazim dipakai dalam organisasi, sehingga akan menciptakan lingkungan pengendalian yang saling mendukung pada setiap bagian dalam perusahaan. Sedangkan sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.²

Pengawasan atau pengendalian berfungsi untuk membandingkan kejadian sekarang dengan perencanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan perbaikan di masa depan. Manajemen lembaga keuangan syariah dapat melihat apakah nasabah dapat memenuhi semua kewajibannya atau tidak dalam tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka manajemen harus mengadakan serangkaian perbaikan dalam pemberian pembiayaan *murabahah*.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³ Salah satu bentuk pembiayaan dari akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja sang investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Karena keuntungan yang menjanjikan itulah hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk *financial* dalam pengembangan modal mereka. Produk pembiayaan *murabahah* ini membantu berbagai macam bentuk usaha dalam segi pembiayaan modal bagi semua unit *murabahah*.

² Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h. 129.

³ Muammar Khaddafi. Dkk. *Akuntansi Syariah "Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi"* (Medan : Penerbit Madenatera, 2016), h.178.

Pembiayaan jenis ini pembayarannya dapat dilakukan dengan cara kredit dan besarnya angsuran tetap sampai akhir pelunasan pembiayaan. Pembiayaan murabahah ini selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, namun hal tersebut juga tidak lepas dari pembiayaan pembiayaan macet/bermasalah. Pembiayaan bermasalah pada BMT Nusantara Berkah Sentosa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah

Januari 2018	April 2018	Juli 2018
2% = Rp 3.200.000	2% = Rp 4.530.000	3% = Rp 8.320.000

Sumber : Laporan Pembiayaan *Murabahah* BMT Nusantara Berkah Sentosa

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa BMT Nusantara Berkah Sentosa memiliki persentase pembiayaan *murabahah* bermasalah yang cukup tinggi. Jumlah pembiayaan *murabahah* BMT Nusantara Berkah Sentosa bulan Januari 2018 adalah sebesar 2% atau Rp 3.200.000, pada bulan April 2018 adalah sebesar 2% atau Rp 4.500.000, dan yang terakhir pada bulan Juli 2018 adalah sebesar 3% atau Rp 8.320.000. Pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi pada BMT Nusantara Berkah Sentosa, Lubuk Pakam memang belum melampaui ketentuan Bank Indonesia mengenai pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 5%, tetapi tetap saja perlu mendapat perhatian. Perkembangan pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh BMT Nusantara Berkah Sentosa memiliki potensi yang cukup tinggi, namun dibalik realita yang ada banyak permasalahan yang timbul, yang harus dihadapi oleh pengelola. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang dapat secara efektif dan efisien untuk membantu mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan.

Pengendalian internal terhadap pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Nusantara Berkah Sentosa masih terdapat kelemahan, hal ini disebabkan karena nasabah yang tidak membayar angsurannya tepat waktu, bahkan lewat dari waktu jatuh tempo yang menyebabkan kredit macet.

Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Dampak dari adanya kredit macet/bermasalah yang terjadi pada BMT Nusantara Berkah Sentosa menyebabkan perputaran kas di dalam perusahaan menjadi terhambat, dan persediaan kas perusahaan menurun seiring penambahan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kredit macet juga terjadi sebagai akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan *Murabahah* (studi kasus pada BMT Nusantara Berkah Sentosa)”**

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, rumusan masalah terkait yang akan digunakan penulis sebagai bahan penelitian tugas akhir adalah : Bagaimana sistem pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah* pada BMT Nusantara Berkah Sentosa dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada BMT Nusantara Berkah Sentosa dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
Mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan sehingga dapat diterapkan di dunia kerja.

2. Bagi Pembaca

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian lanjutan.
- b. Bagi Perusahaan
Dapat meningkatkan pengendalian internal pada perusahaan tersebut.

E. Batasan Istilah

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem pengendalian adalah susunan komponen fisik yang dihubungkan sedemikian rupa untuk mengatur suatu kondisi agar mencapai kondisi yang diharapkan yang diharapkan
2. Sistem pengendalian internal (*internal control system*) terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya :
 - a. Menjaga aktiva perusahaan.
 - b. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.
 - c. Mendorong efesiensi dalam operasional perusahaan.
 - d. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen
3. Pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk penyediaan dan pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.
4. Tujuan dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai intermediator keuangan yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Sistem Pengendalian Intern

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sebelum memahami pengertian sistem pengendalian, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian sistem. “ Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.⁴Marom menyatakan “Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang disusun dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha.⁵

Menurut Cole/Neuschel dalam bukunya *Accounting System*, seperti dikutip oleh Baridwan defenisi sistem adalah “suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan, yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.⁶

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Pengertian pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.⁷ Pengendalian dapat juga diterjemahkan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁸

⁴ Sumarsan Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* (Jakarta Barat: PT Indeks, 2013), h.2

⁵ Marom, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang* (Jakarta : Grafindo, 2002), h.1

⁶ Baridwan Zaki, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta : BPFE UGM, 2002) h.1

⁷T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta, 2009), h.359

⁸Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.242.

Pengendalian adalah kegiatan memantau, menilai dan melaporkan kemajuan proyek disertai tindak lanjut.⁹

Jadi pengendalian adalah mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma-norma yang telah ditetapkan.

Setelah kita mengetahui pengertian sistem dan pengendalian maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pengendalian adalah susunan komponen fisik yang dihubungkan sedemikian rupa untuk mengatur suatu kondisi agar mencapai kondisi yang diharapkan yang diharapkan.

2. Tujuan pengendalian internal

Sistem dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. sistem pengendalian intern dibentuk oleh perusahaan dengan tujuan agar dapat mengendalikan seluruh kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Tujuan lain dari pengendalian intern adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa :

- a. Aset perusahaan telah dilindungi dengan baik serta digunakan hanya untuk keperluan perusahaan
- b. Membuktikan bahwa informasi yang dihasilkan data akuntansi telah akurat dan dapat digunakan pihak manajemen
- c. Pengendalian intern dibuat dengan tujuan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku¹⁰

3. Unsur Pengendalian Intern

COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions) dibentuk pada tahun 1985 yang bertujuan untuk

⁹Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h.470.

¹⁰<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1>

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. menurut *COSO* Pengendalian Internal terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling terkait, yaitu :¹¹

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menentukan arah perusahaan dan memengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan karyawan. Berbagai elemen penting dari lingkungan pengendalian adalah :

- 1) Integritas dan nilai etika
- 2) Struktur organisasi
- 3) Komite Audit
- 4) Penetapan wewenang dan tanggung jawab
- 5) Praktek dan kebijakan karyawan

b. Penilaian Risiko

Perusahaan harus melakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan.

c. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi akuntansi (SIA) terdiri atas berbagai *record* dan metode yang digunakan untuk melakukan, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai transaksi perusahaan serta untuk menghitung berbagai aktiva dan kewajiban yang terkait di dalamnya. Kualitas suatu informasi yang dihasilkan oleh SIA berdampak pada kemampuan pihak manajemen untuk mengambil tindakan serta membuat keputusan dalam hubungannya

¹¹ James A.Hall, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h. 186.

dengan operasional perusahaan, serta membuat laporan keuangan yang handal.

d. Pengawasan

Pengawasan (*monitoring*) adalah proses yang memungkinkan kualitas desain pengendalian internal serta operasinya. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa prosedur terpisah atau melalui aktivitas yang berjalan.

e. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda :

1) Pengendalian komputer

Pengendalian ini, yang secara khusus berhubungan dengan lingkungan IT dan audit TI.

2) Pengendalian fisik

Ada enam kategori aktivitas pengendalian fisik :

a) Otorisasi transaksi

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi yang diproses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan tujuan pihak manajemen.

b) Pemisahan tugas

Salah satu aktivitas pengendalian yang paling penting adalah pemisahan tugas karyawan untuk meminimalkan fungsi yang tidak boleh disatukan.

c) Supervisi

Asumsi yang mendasari pengendalian supervisi adalah perusahaan memperkerjakan personel yang kompeten dan dapat dipercaya.

d) Catatan akuntansi

Catatan akuntansi perusahaan terdiri atas dokumen sumber, jurnal, dan buku besar. Berbagai catatan ini menangkap esensi ekonomi dari berbagai transaksi dan menyediakan jejak audit berbagai peristiwa ekonomi.

e) Pengendalian akses

Tujuan dari pengendalian akses adalah untuk memastikan bahwa hanya personel yang sah saja yang memiliki akses ke aktiva perusahaan.

4. Keterbatasan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal perusahaan pada umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aset perusahaan telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Menurut Bhayangkara tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan.¹² Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal adalah sebagai berikut :

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena kurang memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. Faktor manusia adalah faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi

¹²Bhayangkara, IBK, *Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 36.

tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, dan bersikap acuh tak acuh.

b. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

c. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian yang dirancang. Kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan menghilangkan proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas.

d. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

e. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. menurut Herry, biaya yang dikeluarkan untuk membentuk atau menerapkan prosedur pengendalian seharusnya jangan sampai melebihi manfaat yang diperkirakan akan dihasilkan dari pelaksanaan prosedur pengendalian internal tersebut.

f. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan, dalam perusahaan yang berskala kecil akan sangat sulit untuk menerapkan pemisahan tugas atau memberikan pengecekan independen mengingat satu karyawan mungkin saja dapat

merangkap dan mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda sekaligus.

5. Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi:

a. Pemisahan Tugas

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

b. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang.

c. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

d. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

e. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

f. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan. Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.

6. Elemen-elemen Pengendalian

Menurut Siswanto dalam sistem pengendalian internal ada empat elemen pokok yang saling berhubungan. Elemen pokok pengendalian tersebut, yaitu :

- a. Kondisi atau karakteristik yang dikendalikan
- b. Instrument atau metode sensor untuk mengukur kondisi atau karakteristik yang dikendalikan
- c. Kelompok, unit atau instrument kendali yang dibandingkan data yang diukur dengan pekerjaan yang direncanakan dan mengarahkan mekanisme perbaikan untuk memenuhi kebutuhan
- d. Kelompok atau mekanisme yang bergerak dan mampu mengadakan inovasi dalam sistem operasi

7. Karakteristik Pengendalian yang Efektif

Pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa penyimpangan dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Secara umum pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- b. Akurat (*Accurate*)
- c. Tepat Waktu (*Timely*)
- d. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensible*)
- e. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focussed on Strategic Control Points*)
- f. Secara Ekonomi Realistic (*Economically Realistic*)
- g. Secara Organisasi Realistic (*Organizationaly Realistic*)

- h. Dikondisikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated With the Organization's Work Flow*)
- i. Fleksibel (*Flexible*), Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and Operational*)
- j. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by Organization Members*)

8. Pengendalian Intern dalam Islam

Pengawasan (pengendalian) dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.¹³ Pembagian pengendalian dalam ajaran islam palig tidak dibagi menjadi dua hal, yaitu :

- a. Pengendalian (control yang berasal dari diri sendiri), yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah seperti yang terdapat pada Surah Al-Mujadilah : 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ
رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا
ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa

¹³Abdul Manan, *Membangun Islam Kaffah*, (Madina Pustaka : 2000), h.152.

yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Mujadilah : 7)¹⁴

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita buat.

- b. Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri, seperti yang dilakukan pada sebuah lembaga atau institusi melalui pengawasan dari manajemen yang ada.

Pengendalian islam memiliki landasan, diantaranya :¹⁵

- 1) *Tawa shaubil haqqi*, saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas.
- 2) *Tawa shaubil shabri*, saling menasehati atas dasar kesabaran, dengan kata lain pengendalian yang dilakukan berulang-ulang.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۳

Artinya : “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”. (Q.S. Al-Ashr : 3).¹⁶

- 3) *Tawa shaubil marhamah*, saling measehati atas dasar kasih sayang, yakni pengendalian dengan pendekatan secara personel dengan tujuan untuk pencegah.

¹⁴Q.S. Al- Mujadillah : 7

¹⁵www.respository.uinjkt.ac.id/dspace/.../MARTHA%20ADRYAN-FSH.pdf.

¹⁶Q.S. Al-Ashr : 3.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya di dalam Islam pengendalian merupakan hal yang paling diperhatikan agar suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik untuk kepentingan pribadi ataupun atas nama lembaga/instansi proses pekerjaan yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

B. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Pada bagian ini akan dibahas simpanan yang terdapat pada koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Sebelum itu, akan dibahas beberapa definisi terkait lembaga keuangan tersebut. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah LKM yang dikelola secara syariah. Lembaga ini dapat berbentuk koperasi jasa keuangan syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

Koperasi menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 adalah badan usaha yang beanggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selanjutnya, Unit Simpan

Pinjam Pembiayaan Syariah yang disebut juga USPPS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.¹⁷

BMT adalah LKMS berbasis koperasi khas Indonesia yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. BMT menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Pada KSPPS, LKMS maupun BMT, secara umum memiliki produk-produk penghimpunan dana. Terdapat tiga macam simpanan pada lembaga-lembaga tersebut yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela.

a. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang berasal dari anggota yang disetorkan secara periodik selama menjadi anggota, besarnya di antara anggota dapat berbeda dan tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota.

b. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang berasal dari anggota yang disetorkan hanya satu kali selama menjadi anggota.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela memiliki ketentuan yang berbeda dari simpanan pokok dan wajib. Secara definisi simpanan tidak ada perbedaan terhadap simpanan pokok dan wajib. Namun dari segi jumlah simpanannya, tidak ditentukan secara langsung jumlahnya oleh rapat anggota koperasi dan jumlahnya bersifat bebas. Dalam hal simpanan sukarela, wajib dibayar oleh anggota kehormatan. Anggota kehormatan dalam koperasi yaitu seseorang yang karena

¹⁷Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.113

kedudukannya diminta oleh pengurus untuk menjadi anggota kehormatan koperasi, serta berperan aktif untuk kemajuan koperasi.¹⁸

2. Ciri-ciri Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Sebagai lembaga keuangan informal, menurut Soemitra BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Beorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomipaling banyak untuk anggotadan masyarakat
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan danazakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

3. Tujuan Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal.

C. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

¹⁸*ibid*, h. 115.

merupakan *defisit unit*.¹⁹ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : 1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.²⁰

1. Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁹Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2000), h.160.

²⁰Ibid. h.161

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan dengan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah. Unsur Kepercayaan dalam kredit adalah suatu keyakinan bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan dan perjanjian yang telah disetujui secara bersama.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara sipemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing yang kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak. Unsur Kesepakatan adalah bahwa semua persyaratan kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka Waktu adalah Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak dan jangka waktu berakhir saat kredit selesai dilunasi.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula

sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja. Pengembalian kredit mengandung risiko terlambat ataupun macetnya pelunasan kredit, semakin panjang waktu pengembalian kredit, semakin besar pula risikonya begitupun sebaliknya.

e. Balas Jasa

Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Pemberian suatu pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan pemberian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut adalah berupa bagi hasil yang telah disetujui oleh pihak bank dan nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk

modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. **Membantu Pemerintah**

Bagi Pemerintah, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan (kredit) berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

3. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, fungsi pembiayaan diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional, karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- e. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa negara.

4. Pembiayaan Bermasalah

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/ cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.²¹

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu : Yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembayaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan oleh pihak KJKS BMT
- b. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (margin) yang menjadi beban anggota yang bersangkutan

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses, yang diharapkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu timbul dipermukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara

²¹ Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2016), h. 206.

profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Terdapat 3 faktor penyebab pembiayaan bermasalah :

a. Faktor Internal

- 1) Analisis pembiayaan yang tidak akurat
- 2) Lemahnya pengawasan dan monitoring
- 3) Peningkatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna
- 4) Pembiayaan yang diberikan terkonsentrasi baik jumlah maupun penerimaannya
- 5) Lemahnya SDM

b. Faktor Eksternal

- 1) Anggota menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya
- 2) Anggota kurang mampu mengelola usahanya
- 3) Anggota beritikad tidak baik
- 4) Kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha dan mempengaruhi kemampuan anggota untuk membayar kewajibannya
- 5) Deregulasi peraturan pemerintah pada bidang tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap usaha anggota
- 6) Perubahan iklim usaha yang berpengaruh secara langsung terhadap kondisi usaha anggota
- 7) Keadaan yang bersifat *Force Majeur*, Faktor ini disebabkan karena peristiwa/kondisi di luar kemampuan KJKS BMT dan anggota untuk mengontrol dan menanggulangnya. Penyebab antara lain bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara dan pemogokan.

Penyelamatan oleh bank dapat dilakukan kembali dengan cara yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit
- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :
 - 1) Penambahan dana bank
 - 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali²²

D. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratunrabihah* , *waabaa’u asy-syaimurabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan *Murabahah* merupakan kerja sama antara duapihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituliskan dalam kontrak.

²²*Ibid*, h.209

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana dari suatu transaksi jual beli barang antara dua pihak yaitu lembaga syariah (banksyariah) dan nasabah, dimana nasabah menjual barang kepada bank syariah kemudian bank syariah menjual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

2. Landasan syariah

a. Al- Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Quran :275)

b. Al- Hadis

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).²³

3. Syarat *Murabahah*

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

²³Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.102

Secara prinsip, jika syarat (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- 2) Kontrak pertama kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- 3) Membatalkan kontrak

4. **Jenis *Murabahah***

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Murabahah* tanpa pesanan (langsung beli), yaitu BMT yang membelikan sendiri barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali ke nasabah sesuai dengan harga pokok ditambah margin/keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabahnya tinggal menerima barangnya saja.
- b. *Murabahah* berdasar pesanan (salam), yaitu nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan, kemudian BMT hanya bertugas membayar barang yang dibeli oleh nasabah. Jadi sebelumnya BMT sudah harus memiliki relasi dengan toko-toko yang biasanya digunakan untuk transaksi jual beli *murabahah*.

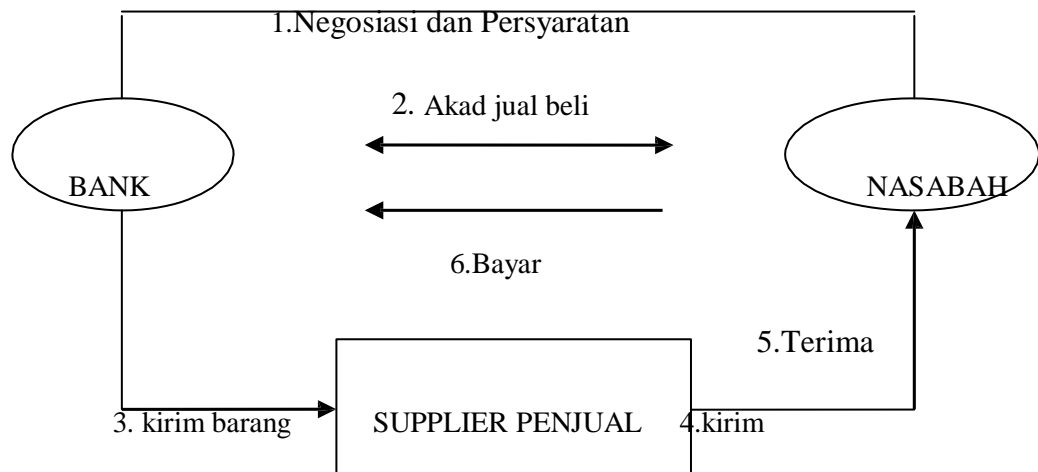
5. **Manfaat dan Resiko *Murabahah***

Sesuai dengan sifat bisnis (tjarah), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut.

- a. *Default* atau kelalaian yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan:

1. Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah untuk melakukan perjanjian atau negosiasi dan persyaratan.
2. Setelah melakukan negosiasi kemudian melakukan perjanjian berupa akad jual beli antara kedua belah pihak.
3. Dari pihak bank mulai melakukan aktivitas berupa pembelian barang kepada penjual untuk nasabah atas nama bank.
4. Atas nama bank, penjual mengirim barang kepada nasabah yang telah ditunjuk oleh bank.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen perjanjian dari penjual atas nama bank.
6. Setelah nasabah menerima barang dan dokumen dari penjual, makayang terakhir kewajiban nasabah membayar barang tersebut kepada bank sesuai dengan perjanjian awal.

E. Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1
Hasil penelitian terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Dwi Karina (2005)	Analisis sistem pembiayaan <i>murabahah</i> untuk meilai pengendalian piutang pada BMT AN-NAHL Pandaan Pasuruan	Kualitatif	Dari semua pemenuhan unsur-unsur dari sistem pembiayaan <i>murabahah</i> maupun dari pengendalian piutang ada beberapa kekurangan namun dalam prakteknya BMT AN- NAHL Pandaan- Pasuruan telah dapat menjalankan secara wajar dan baik. Hal itu terlihat dengan diterapkan empat komponen- komponen dengan baik yang diantaranya struktur organisasi, sistem dan

			wewenang, praktek yang sehat serta karyawan yang bermutu.
Nurhabribnu (2011)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Surya Mandiri Ponorogo	kualitataif	Hasil analisis yang di dapat menunjukkan bahwa BMT Surya Mandiri telah memisahkan tugas dan tanggung jawab fungsionalnya dengan jelas. Setiap permohonan pembiayaan yang masuk ke BMT Surya Mandiri selalu diketahui oleh petugas-petugas yang bersangkutan, mulai dari AO, manajer, pengurus, administrasi umum, keuangan, dan teller. Sistem otorisasi telah berlangsung dengan baik.
Zulfina Maya Sari (2015)	Analisis Sistem Pengendalian	Kualitatif	Sistem penjualan pada umumnya masi kurang efekif karena

	Intern Penjualan Kredit pada PT. Astra International, Tbk Auto 2000 Sisimangaraja Medan		masih memberdayakan beberapa fungsi terkait dalam menjalankan kegiatan operasional penjualan kredit, dimana masih adanya kekurangan dalam sumber daya manusia mengakibatkan pihak yang di anggap profesional dapat melakukan tugas ganda (rangkap tugas)
Dolli Paulina Surupati (2013)	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Penjualan dan Penagihan Piutang pada PT. Laris Manis Cabang Manado	Kualitatif	Sistem penjualan pada umumnya sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan fungsi antara piutang, penagihan piutang, penerimaan hasil penagihan dan pencatatan piutang.

Parno (2005)	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Semarang	Kuantitatif	Tingkat efektivitas sistem pengendalian intern KPRI di kota Semarang rata-rata termasuk dalam klasifikasi efektif, dan keberhasilan usaha KPRI di kota Semarang dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian intern

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²⁴ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman Analisis Sitem Pengendalian Internal atas Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Nusantara Berkah Sentosa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan saat melakukan penelitian ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Nusantara Berkah Sentosa yang berlokasi di Jl. Bakaran Batu Komplek Pasar Bakaran Batu No. 40 D Lubuk Pakam

²⁴Bogdan, Robert, Steven Taylor, *Pengantar Metode Kualitatif* (Jakarta : LP3ES, 2007), h.4

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan waktu penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Pada penelitian ini subjek penelitian yang penulis teliti yaitu :

1. Kepala BMT Nusantara Berkah Sentosa
2. Pengelola
3. Nasabah

D. Jenis dan Sumber data penelitian

Berikut jenis dan sumber data penelitian dalam pengumpulan data :

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara guna memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan.
- b. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari perpustakaan dengan cara mengumpulkan data-data teoritis berupa buku maupun skripsi-skripsi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan saat melakukan penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.”²⁵ Wawancara ini mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam KSPPS BMT Nusantara Berkah Sentosa. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum KSPPS BMT Nusantara Berkah Sentosa, pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah*.

2. Dokumentasi

cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

F. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisa ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita yang holistik, kompleks dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁵Sumarni, Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta, 2006), h.86.

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan unsur-unsur pengendalian intern. Pengumpulan data ini bersumber dari berbagai referensi yang ada baik dari buku, halaman web ataupun dari penelitian-penelitian yang telah membahas tentang pengendalian intern sebelumnya.
2. Menganalisis pelaksanaan pengendalian intern dengan cara observasi dan wawancara langsung yang terkait dengan penelitian, yaitu:
 - d. Menganalisis struktur organisasi
 - e. Menganalisis sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
 - f. Menganalisis kualitas karyawan yang sesuai dengan bidangnya
 - g. Menganalisis praktik kerja karyawan
3. Menarik hasil dan kesimpulan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT Nusantara Berkah Sentosa

KSPPS BMT Nusantara Berkah Sentosa merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang berdiri di jalan Komplek Pasar Bakaran Batu Blok D No. 40 Lubuk Pakam. Awal berdirinya BMT ini pada 02 Agustus 2017 dengan modal awal sebesar Rp 75.000.000,00, modal tersebut diperoleh dari masyarakat dan termasuk modal dari BMT mitra.

BMT Nusantara Berkah Sentosa didirikan oleh Pinbuk, Bank Syariah Mandiri dan masyarakat di kabupaten-kota setempat. Kedua lembaga tersebut diwakili oleh orang yang ditunjuk. Tujuan dari BMT Nusantara Berkah Sentosa adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat membangun kepedulian kepada du'afa dan turut menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil.

2. Visi dan Misi BMT Nusantara Berkah Sentosa

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, mewujudkan kesejahteraan dengan mengembangkan lembaga usaha mikro syariah yang berkah, terpercaya, amanah, transparan dengan berlandaskan Syariah Islam.

b. Misi

- 1) Menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebagai lembaga keuangan syariah kepercayaan masyarakat
- 2) Meningkatkan perekonomian syariah dalam bidang usaha
- 3) Mengelola dana pinjaman dengan system pemutaran dana
- 4) Membudayakan bermuamalah secara syariah (berakhlak, jujur, amanah dll.)

- 5) Menjadikan tempat bagi anggota untuk berinvestasi secara aman, nyaman, serta sesuai syariah.

3. Tujuan berdirinya BMT Nusantara Berkah Sentosa

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui system syariah
- b. Meningkatkan semangat peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah
- c. Mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

4. Prinsip Operasional BMT Nusantara Berkah Sentosa

- a. Halal
Dikelola dengan amanah dan sesuai syariah
- b. Bonus dan Bagi hasil kompetitif
Dengan nisbah yang proposional kami mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif
- c. Modern dan Cepat
Software Lembaga keuangan syariah yang modern komputerisasi yang kami terapkan, dapat melayani seluruh aktivitas keuangan nasabah
- d. Layanan Antar Jemput Mitra
Jika menghendaki kami siap melayani jemput mitra sesuai dengan kesepakatan.

5. Produk-produk BMT Nusantara Berkah Sentosa

- a. Simpanan Utama Nusantara
Simpanan ini menggunakan prinsip akad Wadiah yadh dhamanah, penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat. Setoran minimal awal Rp 25.000,- minimum setoran berikutnya Rp 10.000,-

b. Simpanan Pendidikan Nusantara

Simpanan ini menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, merupakan simpanan untuk Persiapan kebutuhan pendidikan. Pengambilan menjelang ketika akan digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru. Setoran awal minimal Rp 25.000,- setoran bulanan minimal Rp 10.000,-

c. Simpanan Haji Nusantara

Simpanan untuk persiapan/rencana menunaikan ibadah haji, dapat diambil pada saat akan membayar Ongkos Naik Haji (ONH). Setoran awal minimal Rp 250.000,-

d. Simpanan Umrah Nusantara

Simpanan untuk persiapan/rencana menunaikan ibadah umrah, dengan setoran bulanan minimal Rp 100.000,- setoran bulanan minimal Rp 100.000,-

e. Simpanan Qurban Nusantara

Simpanan untuk persiapan/rencana melaksanakan ibadah qurban, setoran minimal Rp 100.000,- setoran bulanan minimal Rp 50.000,-

f. Simpanan Berjangka Nusantara

Simpanan dalam jangka waktu tertentu 3 bulan/ 6 bulan/ 12 bulan, setoran awal minimal Rp 1000.000,-

Produk Pembiayaan :

1) Kerja Sama Usaha

Menggunakan prinsip musyarakah mutanaqisah. Pembiayaan usaha produktif yang modalnya dan bagi hasilnya dengan cara diangsur. Bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

2) Modal Usaha

Menggunakan prinsip Mudharabah. Pembiayaan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai oleh BMT, pengembalian modal dan bagi hasilnya dengan cara diangsur, ditentukan bagi hasil dengan porsi sesuai kesepakatan.

3) 45Investasi

Menggunakan prinsip murabahah. Pembiayaan untuk sarana usaha atau suatu barang dengan cara diangsur pokok dan marginnya.

6. Wilayah Pemasaran BMT Nusantara Berkah Sentosa

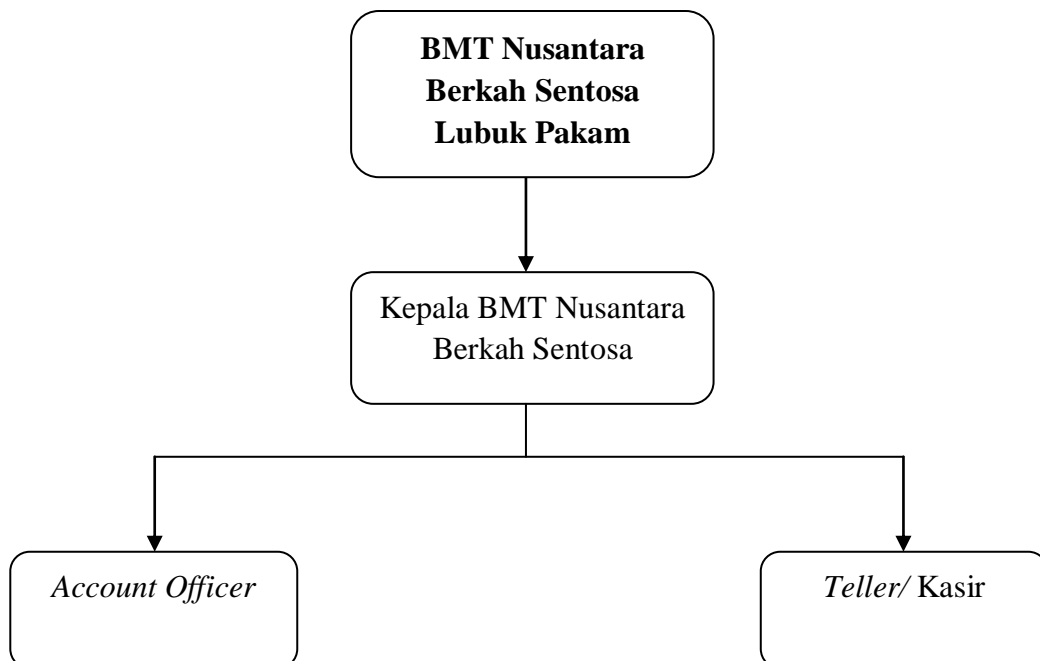
Tabel 4.1

Wilayah Pemasaran BMT Nusantara Berkah Sentosa

No	Wilayah	Tujuan Pemasaran
1	Lubuk Pakam	Pasar Bakaran Batu
2	Lubuk Pakam	Pajak D5
3	Lubuk Pakam	Pasar Minggu
4	Lubuk Pakam	Pajak Pasar 2
5	Lubuk Pakam	Pasar Melintang

Sumber : BMT Nusantara Berkah Sentosa, 2018

7. Struktur Organisasi BMT Nusantara Berkah Sentosa



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Nusantara Berkah Sentosa

Sumber : BMT Nusantara Berkah Sentosa Lubuk Pakam, 2018

Tugas dan wewenang :

1. Kepala BMT Nusantara Berkah Sentosa
Kepala BMT ini bertugas membawahi semua kegiatan yang ada di BMT Nusantara Berkah Sentosa, jadi jika ada permasalahan di BMT maka sudah seharusnya kepala BMT Nusantara Berkah Sentosa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. *Account Officer (AO)*
 1. Melakukan analisis kepada nasabah dan pemeriksaan rutin di lapangan
 2. Melakukan penagihan pembayaran angsuran pembiayaan kepada nasabah
 3. Bertanggung jawab terhadap proses funding (menghimpun dana) dan lending (pembiayaan)
3. *Teller* (kasir)
 - a. Mengelola keuangan sesuai rencana/anggaran perusahaan
 - b. Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya kas
 - c. Melayani nasabah

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Nusantara Berkah Sentosa

BMT Nusantara Berkah Sentosa menggunakan prosedur pembiayaan *Murabahah* yang terdiri dari pengajuan/ permohonan pembiayaan, pemeriksaan dan analisis kredit, persetujuan pembiayaan, perjanjian kredit atau pembiayaan, pencairan pembiayaan, pengawasan kredit, serta pelunasan kredit.

1. Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*

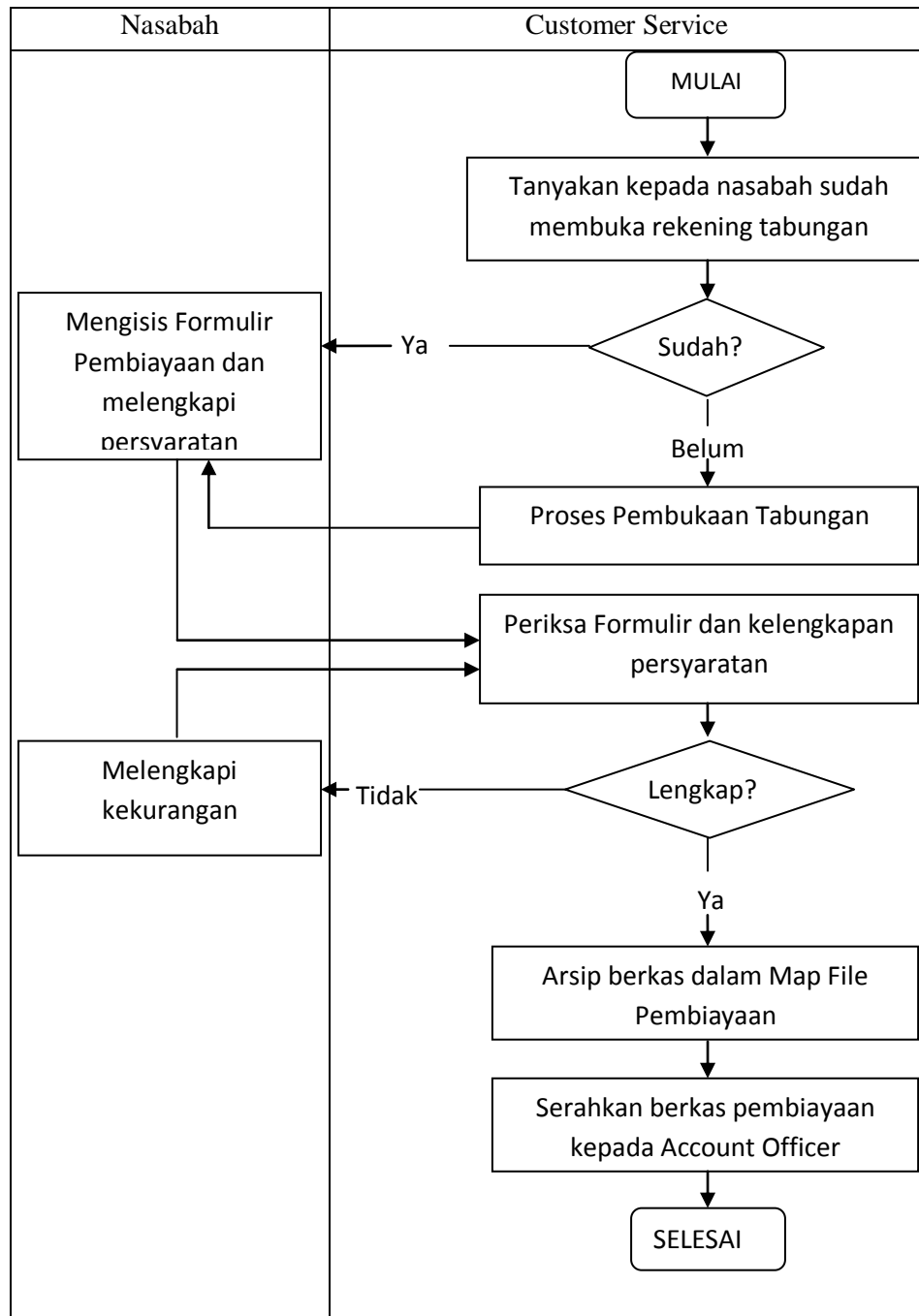
Calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT Nusantara Berkah Sentosa harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota/nasabah dari BMT Nusantara Berkah Sentosa artinya harus memiliki nomor rekening terlebih dahulu. Tahap awal dalam prosedur

pengajuan pembiayaan adalah nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan panduan karyawan koperasi bagian kasir yang bertugas melayani nasabah. Permohonan pembiayaan yang di handle oleh kasir memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota pembiayaan.

Calon anggota pembiayaan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh kasir dan menyerahkannya kembali dengan dilampiri syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan yang ditentukan oleh pihak BMT. Formulir pengajuan pembiayaan yang diisi tentang identitas peminjam, jenis pembiayaan, jumlah uang, jangka waktu pelunasan. Syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan antara lain :

- a. Menjadi anggota dan membuka rekening simpanan
- b. Photo copy KTP suami & istri
- c. Photo copy Kartu Keluarga
- d. Mengisi formulir pinjaman
- e. Jumlah pinjaman 3 (tiga) kali saldo tabungan
- f. Photo copy Rekening listrik/air bulan terakhir
- g. Pas photo 3x4 berwarna (suami & istri)

Berikut prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* :



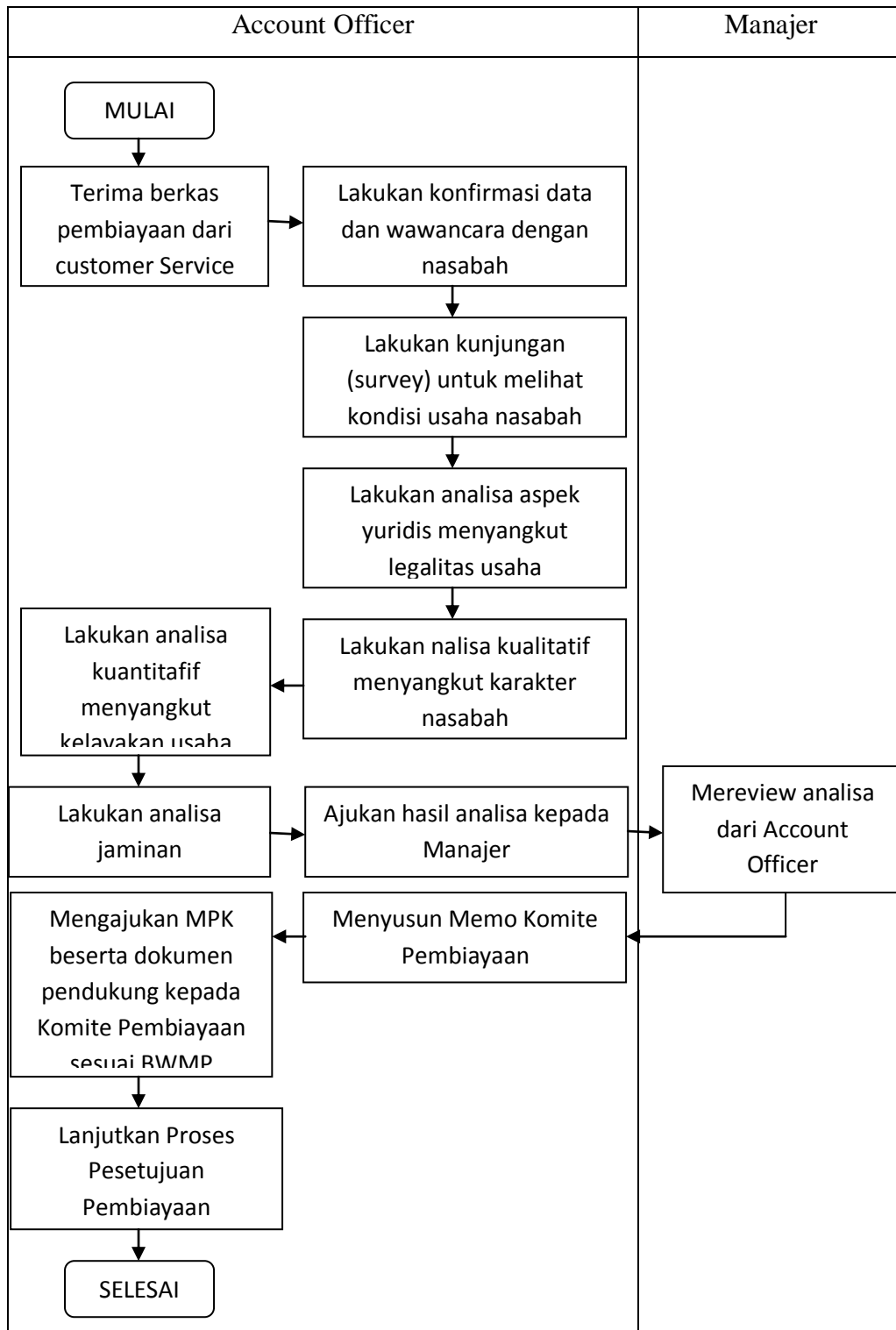
Gambar 4.2 Prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah*

Sumber : BMT Nusantara Berkah Sentosa Lubuk Pakam, 2018

2. Pemeriksaan dan Analisis Kredit

Setelah persyaratan dilengkapi oleh nasabah, sebelum pembiayaan disetujui, terlebih dahulu dilakukan analisa pembiayaan yang bertujuan untuk menganalisa persyaratan-persyaratan yang diajukan serta nilai kelayakannya. Formulir beserta persyaratan pengajuan pembiayaan yang telah dikumpulkan di tahap awal oleh calon nasabah diserahkan kepada account officer (AO) bagian pembiayaan untuk dilakukan pemeriksaan data yang diberikan oleh calon nasabah. Account Officer akan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pengajuan permohonan pembiayaan nasabah yang diambil dari data file nasabah dan permohonan. Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, account officer segera melakukan wawancara dan kunjungan kepada calon peminjam. Analisis yang dilakukan ini mencakup penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi serta prospek usaha calon debitur. Analisa pembiayaan ini juga berguna untuk mencapai sasaran yang diinginkan BMT agar terhindar dari resiko pembiayaan serta sasaran pembiayaan tepat kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan.

Hasil analisis dituliskan dalam memo hasil analisis yang di dalamnya berisi tentang identitas calon peminjam, penghasilan dalam sebulan, biaya yang dikeluarkan dalam sebulan, hasil analisis 5C, jumlah nominal yang telah disetujui, serta tanda tangan kepala BMT. Bila permohonan tersebut dianggap tidak layak untuk diberikan maka akan dibuat surat penolakan pada nasabah. Berikut analisa pembiayaan :

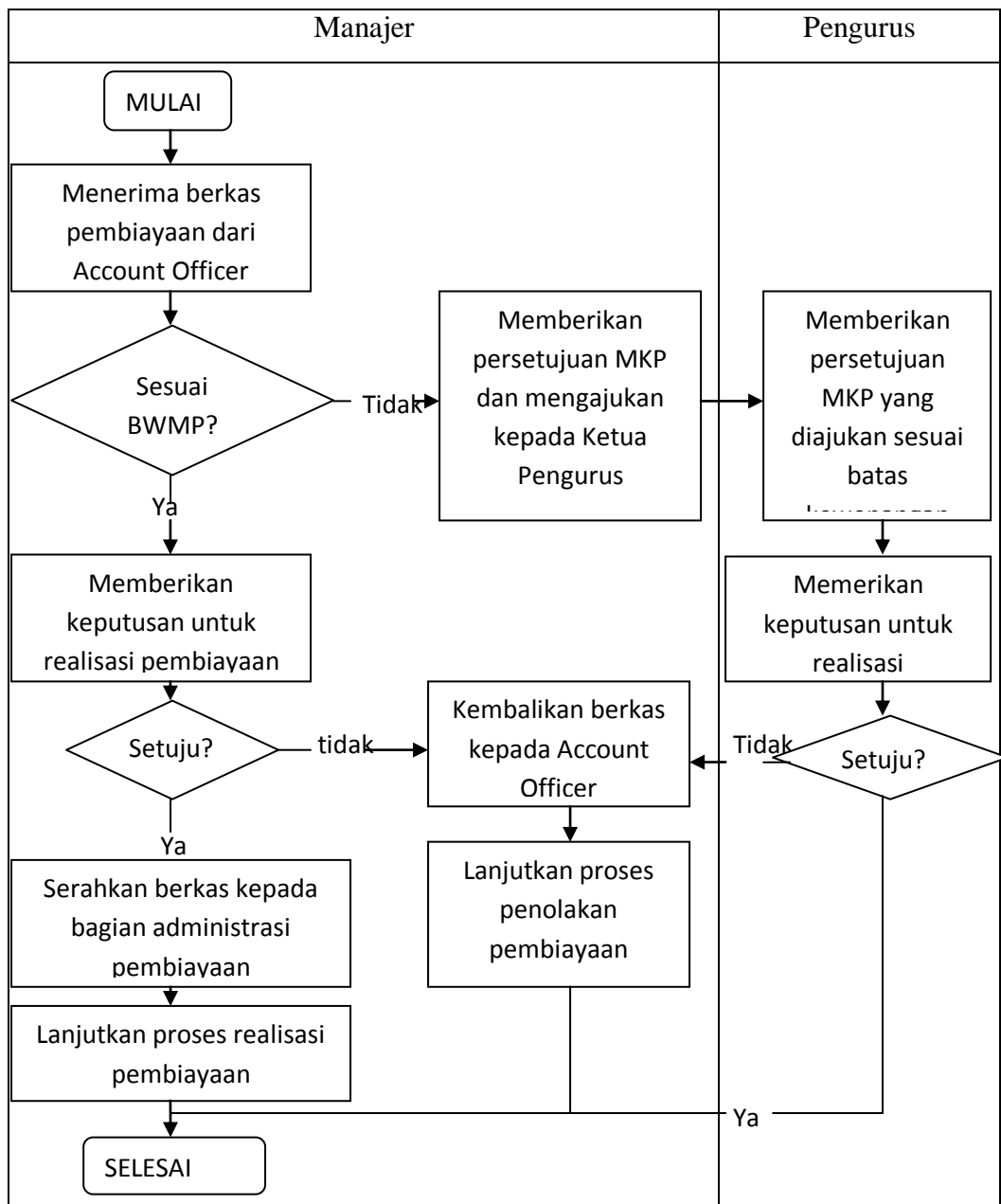


Gambar 4.3 Analisa Pembiayaan

Sumber : BMT Nusantara Berkah Sentosa Lubuk Pakam,2018

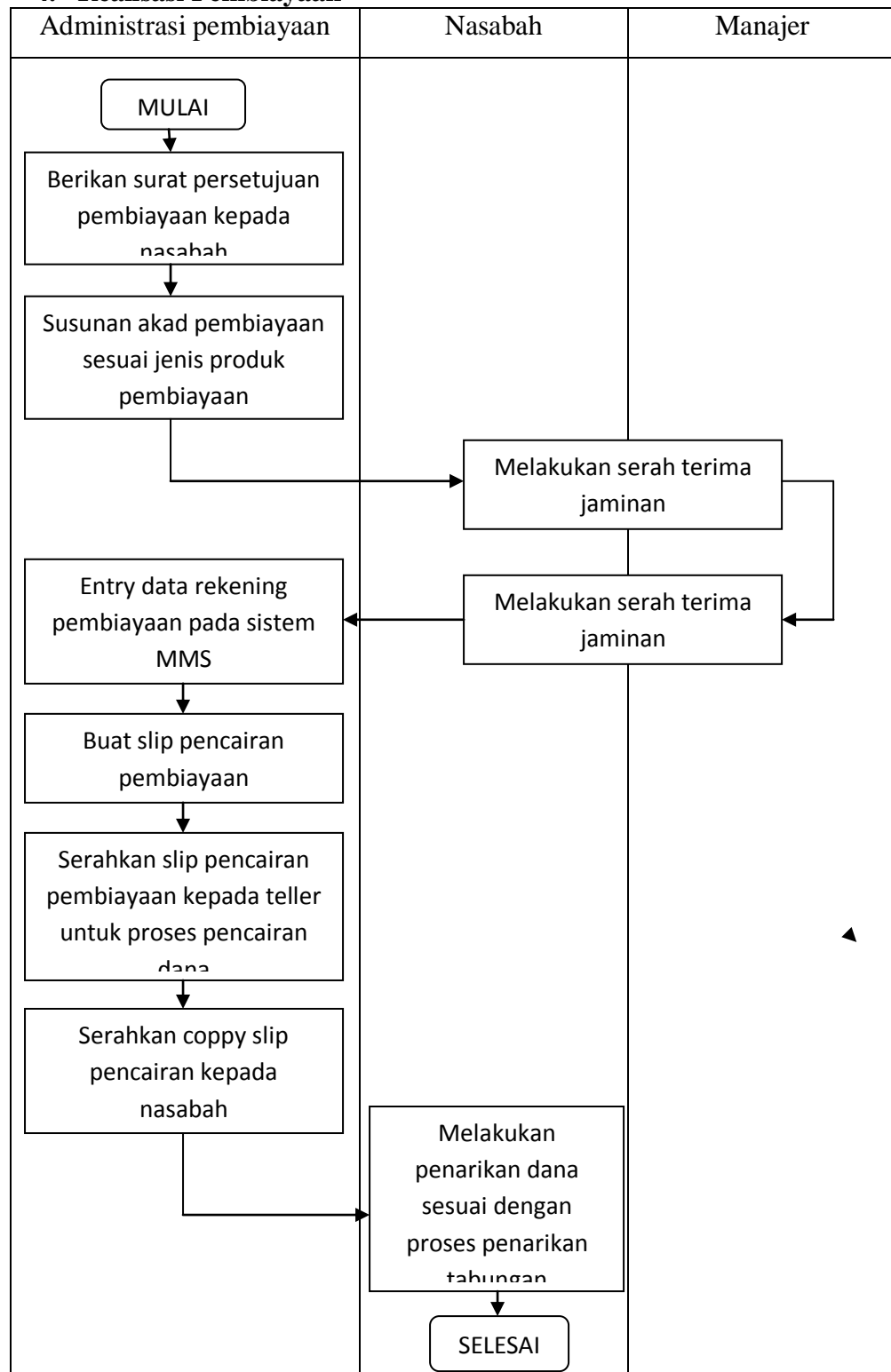
3. Persetujuan Pemberian Pembiayaan

Persetujuan pemberian pembiayaan dilakukan pihak-pihak tertentu sesuai kewenangan yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, selanjutnya akan dilakukan akad pembiayaan oleh pihak BMT hari itu juga. Berikut persetujuan permohonan pembiayaan:



Gambar 4.4 Persetujuan Permohonan Pembiayaan

4. Realisasi Pembiayaan



Gambar 4.5 Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan meliputi :

- a. perjanjian kredit atau akad pembiayaan
pada akad pembiayaan pihak BMT memberikan surat persetujuan pembiayaan kepada nasabah dan membuat susunan akad pembiayaan sesuai jenis produk, sebelum melakukan penandatanganan, terlebih dahulu manajer membacakan isi dari akad pembiayaan.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak BMT meliputi :

- a. Pihak pemberian kredit (bank yang bersangkutan)
- b. Pihak penerima kredit (nasabah)
- c. Tujuan pemberian kredit
- d. Besarnya kredit yang akan diberikan bank
- e. Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit
- f. Jangka waktu pengembalian kredit (angsuran kredit)
- g. Jadwal pembayaran angsuran kredit
- h. Jaminan kredit

Perjanjian yang dibuat tersebut ditandatangani pihak BMT yang diwakili oleh kepala cabang, pemohon dan manajer.

- b. Pencairan Dana Pembiayaan
Pencairan kredit yang diminta debitur hanya dapat dilakukan setelah debitur yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti yang dituangkan dalam akad pembiayaan. Setelah penandatanganan akad pembiayaan maka prosedur selanjutnya pencairan dana pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan diproses oleh kasir dan dana akan langsung masuk ke rekening debitur.
- c. Pelunasan Pembiayaan
Pada masa terakhir setoran pembiayaan dengan akad *murabahah*, nasabah harus melunasi kewajiban dan bagi hasil yang sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan yang telah ditandatangani di awal. Pihak BMT akan memberikan kartu angsuran pembiayaan *murabahah*

kepada nasabah, setiap nasabah yang akan membayar angsuran tersebut, kartu angsuran harus selalu dibawa. Berikut tabel angsuran pembiayaan modal usaha :

Tabel 4.2
Angsuran Pembiayaan Modal Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah BMT Nusantara Berkah Sentosa

Jumlah Pembiayaan	Hari		
	30	60	90
500.000	17.500	11.944	
1.000.000	34.833	18.167	12.611
1.500.000	52.000	27.000	18.667
2.000.000	69.000	35.667	24.556
2.500.000	86.250	44.583	30.694
3.000.000	103.000	53.000	36.333

Jika nasabah sudah melunasi kewajiban beserta bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, maka pihak BMT akan memberikan stempel di kartu angsuran pembiayaan *murabahah* yang bertuliskan lunas sebagai tanda bahwa nasabah sudah melunasi pembiayaan *murabahah* yang diambil.

C. Pembahasan

1. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO

a. Lingkungan Pengendalian

Manajemen BMT Nusantara menganggap bahwa lingkungan pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah* itu penting. Lingkungan pengendalian BMT akan di analisa berdasarkan faktor-faktor yang menyusun lingkungan pengendalian dari perusahaan.

1) Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai etika karyawan BMT Nusantara Berkah Sentosa sudah terbukti cukup baik dalam melayani nasabah. Hal ini dapat dilihat pihak BMT selalu menerapkan sistem *greeting 3S* (senyum, salam, sapa) dan menggunakan atribut seragam lengkap serta tanda pengenal ketika akan melayani nasabah yang terbukti mendukung terciptanya lingkungan kerja yang ramah dan kondusif bagi karyawan. Selain itu, seluruh karyawan BMT sudah memiliki sikap taat dan disiplin terhadap aturan dan prosedur tertulis tentang pengajuan permohonan pembiayaan yang dimiliki BMT, ini terbukti dengan diwajibkannya semua karyawan BMT untuk absen saat akan masuk kantor dan ketika akan pulang kantor. Kebiasaan seperti ini akan melatih kedisiplinan karyawan untuk datang tepat waktu dan bertanggungjawab pada tugas dan kewajibannya.

2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi disusun sesuai fungsionalnya, yaitu terdiri dari Kepala BMT Nusantara Berkah Sentosa, *Account Officer*, dan Teller. Penyusunan struktur organisasi ini terlihat jelas pembagian tugas dan wewenang dari setiap bagian yang ada di BMT Nusantara Berkah Sentosa, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih baik.

3) Komite Audit

BMT Nusantara Berkah Sentosa mempunyai komite audit, bagian audit melakukan pemeriksaan dengan selama enam bulan sekali.

4) Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan pengembangan dari struktur organisasi, yang secara garis besar diwujudkan dalam bentuk pemisahan fungsi-fungsi. Dengan

adanya pemisahan tersebut, maka dapat dilihat apakah karyawan telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai fungsinya.

5) **Praktek dan Kebijakan Karyawan**

Penerimaan karyawan, pencatatan dan penyimpanan data karyawan di BMT Nusantara Berkah Sentosa ditangani oleh Kepala BMT Nusantara Berkah Sentosa. Disamping itu BMT Nusantara Berkah Sentosa juga telah mengadakan pelatihan dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi atau telah mencapai target.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian resiko sangat diperlukan untuk menunjang efektifitas kinerja dari suatu perusahaan. Dalam hal ini, BMT Nusantara Berkah Sentosa dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan suah menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga hal tersebut dalam meminimalisir resiko yang akan terjadi

c. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan melibatkan fungsi yang terkait, prosedur yang harus diikuti, dokumen dan catatan yang diperlukan serta laporan yang dihasilkan. Untuk penyebaran informasi ke pihak eksternal nasabah, BMT Nusantara Berkah Sentosa menyediakan majalah, dan brosur untuk disebarakan ke masyarakat.

d. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh BMT Nusantara Berkah Sentosa, adalah dengan memantau dan memeriksa secara rutin pelaksanaan kerja dari fungsi-fungsi terkait, apakah telah sesuai atau dengan metode dan prosedur. Pengawasan ini juga dilakukan secara langsung kepada nasabah dengan azas silaturahmi.

e. **Aktivitas Pengendalian**

1) Otoritas transaksi

Otoritas atas transaksi dan aktivitas dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh orang yang berwenang pada dokumen untuk transaksi tersebut, misalnya dalam hal pembiayaan *murabahah*, semua tahapan dan prosedur dalam pengajuan permohonan pembiayaan merupakan tanggung jawab dari setiap karyawan pembiayaan yang terkait dan sudah menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing.

2) Pemisahan tugas

Aktivitas pemisahan tugas oleh masing-masing bagian atau fungsi, antara lain : (a) bagian mencari nasabah dan persetujuan pembiayaan (*Account Officer*), terpisah dengan (b) bagian menginput data masuk dan keluar (*Teller*).

3) Supervisi

Karyawan yang kompeten dalam bidangnya dapat dilihat dari kebijakan manajemen, yaitu berupa prosedur perekrutan karyawan yang selektif melalui tahap-tahap sesuai dengan bidangnya.

4) Catatan akuntansi

BMT Nusantara Berkah Sentosa membuat dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang bertujuan untuk pengendalian intern di BMT.

5) Pengendalian akses

Perlindungan fisik terhadap dokumen dan catatan telah memadai, yaitu dengan tersedianya *blinder map* sebagai tempat penyimpanan masing-masing dokumen, serta membuat kopian dari dokumen tersebut.

2. Analisis Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal atas pembiayaan *Murabahah* berbasis COSO

a. Lingkungan Pengendalian

Kepala BMT Nusantara Berkah Sentosa menganggap bahwa lingkungan pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah* itu penting. Lingkungan pengendalian internal pada BMT Nusantara Berkah Sentosa akan di analisis berdasarkan faktor-faktor yang menyusun lingkungan pengendalian dari perusahaan.

1) Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan Nilai Etika pada BMT Nusantara Berkah Sentosa sudah berjalan dengan baik, seluruh karyawan sudah menerapkan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) dan seluruh karyawan juga sudah menggunakan seragam dengan atribut BMT sebagai tanda pengenal untuk nasabah. Namun, dalam kedisiplinan harian, BMT Nusantara Berkah Sentosa masih menggunakan absensi manual. Sistem absensi yang masih manual ini tidak memungkinkan karyawan untuk dapat melakukan penyimpangan

2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi ini telah dirancang dan disusun dengan baik, yaitu secara fungsional yang terdiri dari kepala BMT, Account Officer dan Teller. Dari hasil pengamatan penulis menemukan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian karena belum mencerminkan fungsi yang seharusnya, antara lain :

- a) Account Officer, yang bertanggung jawab atas persetujuan pembiayaan dan penagihan angsuran pembiayaan juga berfungsi sebagai menginput data masuk dan keluar.

- b) Teller, yang bertugas menginput data masuk dan keluar, juga melakukan tugas sebagai penagih angsuran.

3) Komite Audit

Auditor melakukan pemeriksaan terhadap BMT Nusantara Berkah Sentosa selama enam bulan sekali. Selama pemeriksaan auditor melakukan pemeriksaan data keuangan dan lain sebagainya.

4) Penetapan wewenang dan tanggung jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian internal sudah cukup baik dilakukan oleh manajemen BMT Nusantara Berkah Sentosa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemisahan fungsi dan penetapan wewenang kepada setiap anggota sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

5) Praktek dan Kebijakan Karyawan

Kebijakan dan prosedur karyawan di BMT Nusantara Berkah Sentosa telah diterapkan cukup baik, hal ini memegang peranan yang penting bagi jalannya pengawasan karena karyawan merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan pengendalian internal perusahaan. Dalam ini BMT telah menerapkan kebijakan perekrutan, pelatihan dan memberi penghargaan sesuai dengan tanggung jawab setiap karyawan yang berprestasi. Kondisi seperti ini baik untuk membina kualitas karyawan yang jujur, terampil, dan memiliki loyalitas terhadap BMT Nusantara Berkah Sentosa.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian resiko yang dilakukan oleh manajemen dengan

menggunakan sistem untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi sudah cukup baik. Manajemen telah mempelajari resiko-resiko yang ada, serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut menggunakan sistem komputerisasi.

c. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BMT Nusantara Berkah Sentosa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari semua transaksi pembiayaan dilakukan dengan baik dan jelas. Sebagai sistem informasinya BMT Nusantara Berkah Sentosa menyebarluaskan brosur di sekitaran Lubuk Pakam, dan majalah terletak di meja kantor BMT Nusantara Berkah Sentosa.

d. Pengawasan

Aktivitas pengawasan kepada nasabah yang dilakukan BMT Nusantara Berkah Sentosa belum berjalan dengan baik, karena lemahnya dalam hal pemberian persetujuan yang dilakukan oleh pihak BMT. Selain itu pihak BMT hanya melakukan pemantauan secara langsung kepada nasabah dengan azas silaturahmi, tidak melakukan bimbingan dan arahan terhadap cara kerja usaha nasabah.

e. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa setiap arahan atau petunjuk manajemen dilaksanakan dengan baik. Arahan manajemen ini dilaksanakan dan dirancang untuk menanggulangi resiko yang bisa terjadi dalam aktivitas perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

1) Otoritas transaksi

Otoritas atas transaksi dan aktivitas dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh orang yang berwenang pada

dokumen untuk transaksi tersebut, misalnya dalam hal pembiayaan *murabahah*, semua tahapan dan prosedur dalam pengajuan permohonan pembiayaan merupakan tanggung jawab dari setiap karyawan pembiayaan yang terkait dan sudah menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing. pada prakteknya, pengajuan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dianggap layak atau tidak layak merupakan keputusan oleh pejabat-pejabat bank berwenang yang sudah memiliki batasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari adanya batasan dan tanggung jawab tentang kewenangan dalam pemutusan pembiayaan pada BMT Nusantara Berkah Sentosa, pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dengan penandatanganan akad pembiayaan oleh debitur, dan diotorisasi oleh kepala BMT Nusantara Berkah Sentosa, serta disaksikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sudah cukup jelas menggambarkan persetujuan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian sesuai *syariah* islam dan hukum.

2) Pemisahan Tugas

BMT Nusantara Berkah Sentosa telah mengadakan pemisahan tugas yang cukup pada setiap transaksi atau kegiatan yang terjadi diperusahaan. Otoritas penyetujuan pemberian *murabahah* pada BMT Nusantara Berkah Sentosa telah terpisah tugas dan wewenangnya dengan fungsi analisis pembiayaan.

3) Supervisi

Asumsi yang mendasari pengendalian supervisi adalah perusahaan mempekerjakan personel yang kompeten dan dapat dipercaya. BMT Nusantara Berkah Sentosa sudah mempekerjakan karyawan yang kompeten dan ahli dalam bidangnya.

4) Catatan akuntansi

BMT Nusantara Berkah Sentosa membuat dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang bertujuan untuk pengendalian intern di BMT. Dokumen yang digunakan perusahaan telah menggunakan nomor urut tercetak. Dengan adanya nomor urut tercetak ini sistem pengendalian intern di BMT sudah cukup baik karena memperkecil kemungkinan terjadi penggunaan formulir dan bukti transaksi lebih dari satu kali.

5) Pengendalian akses

Perlindungan fisik terhadap dokumen dan catatan telah memadai, yaitu dengan tersedianya *blinder map* sebagai tempat penyimpanan masing-masing dokumen, serta membuat kopian dari dokumen tersebut. selain itu, BMT Nusantara Berkah Sentosa juga telah melakukan pengawasan terhadap data-data yang ada pada komputer BMT dengan menggunakan *user.id* untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Menurut penulis kebijakan tersebut dalam mewujudkan perlindungan fisik catatan serta aktiva perusahaan sudah cukup memadai dalam mewujudkan pengendalian intern yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis sistem pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah* berdasarkan unsur-unsur berbasis COSO yang telah dilakukan di BMT Nusantara Berkah Sentosa di Komplek Pasar Bakaran Batu Blok D No.40 Lubuk Pakam, dapat disimpulkan bahwa BMT Nusantara Berkah Sentosa berperan serta membangun ekonomi masyarakat mikro/kecil menengah, salah satunya dengan pemberian pembiayaan *murabahah*. Prosedur pembiayaan *murabahah* BMT Nusantara Berkah Sentosa yang sederhana dapat dikatakan telah diatur dengan cukup baik sehingga mudah dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan nasabah. Jaringan prosedurnya terdiri dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur analisis dan pemeriksaan kredit, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur akad pembiayaan, prosedur pencairan dana pembiayaan, prosedur pengawasan, serta prosedur pelunasan pembiayaan.

Pengendalian internal terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT Nusantara Berkah Sentosa, Lubuk Pakam sudah berjalan cukup baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan misalnya dalam hal pengisian absensi yang masih manual sehingga menimbulkan kemungkinan pengisian absensi yang tidak sebenarnya. Selain itu masih ditemukan karyawan yang melakukan rangkap kerja atau merangkap dua bagian, tidak tegas dalam hal penagihan angsuran, hal tersebut membuat pembiayaan *murabahah* bermasalah semakin meningkat dan dapat menghambat perputaran aktiva. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip COSO dalam penilaian resiko, karena karyawan yang tidak tegas dalam hal penagihan angsuran, memiliki

resiko yang lebih tinggi dalam proses pemberian pembiayaan *murabahah* kepada nasabah. Penulis menemukan terjadinya ketidaktegasan karyawan dalam menagih angsuran pembiayaan disebabkan karena karyawan tersebut melakukan rangkap tugas, sehingga karyawan tersebut tidak fokus dalam tugasnya. Selain itu usaha yang dijalankan nasabah juga tidak berjalan dengan baik, sehingga nasabah tersebut menunggak dalam pembayaran angsurannya. Hal ini terjadi karena kurangnya arahan dan bimbingan yang dilakukan pihak BMT untuk nasabah yang baru saja memulai usahanya.

B. SARAN

1. Sebaiknya pihak BMT Nusantara Berkah Sentosa mengganti absensi manual dengan sistem absensi otomatis seperti absensi *fingerprint* (sidik jari) atau mesin absensi lainnya. Sehingga tidak akan ada karyawan yang memanipulasi dalam absensi harian.
2. Sudah seharusnya pihak BMT Nusantara Berkah Sentosa melakukan perekrutan karyawan, hal tersebut berguna untuk menghindari terjadinya rangkap kerja atau merangkap dua bagian. Agar karyawan bisa fokus dalam tanggung jawabnya, misalnya dalam hal penagihan angsuran pembiayaan.
3. Dalam hal sistem informasi dan komunikasi sebaiknya dilakukan pelatihan rutin kepada karyawan lama dan baru, hal tersebut bisa membantu karyawan untuk memahami prosedur pembiayaan.
4. Pihak BMT Nusantara Berkah Sentosa perlu memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap administrasi dan cara kerja menjalankan usaha kepada nasabah, hal tersebut berguna untuk usaha nasabah agar berjalan lancar dan tidak akan ada kendala terhadap pengembalian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Al-Karim

Abdul Manan. *Membangun Islam Kaffa*. Madina Pustaka, 2000.

Antonio Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2000.

Baridwan Zaki. *Sistem Informasi Akuntansi* . Yogyakarta : BPFE UGM, 2002.

Bhayangkara, IBK, *Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009

Bogdan, Robert, Steven Taylor. *Pengantar Metode Kualitatif* . Jakarta : LP3ES, 2007.

Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Hall, James, A

Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat, 2009.

Husain Usman. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* . Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2),2017, 1222-1232

Malayu SP Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009,

Marom. *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Jakarta : Grafindo, 2002.

Sumarni, Wahyuni. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta, 2006.

Sumasan Thomas. *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta Barat: PT Indeks, 2013.

T. Hani Handoko, *Manajemen*. Yogyakarta, 2009.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo, 2016.

www.respository.uinjkt.ac.id/dspace/.../MARTHA%20ADRYAN-FSH.pdf